

Kinerja Pemerintah Gampong Alue Naga dalam Pembangunan Infrastruktur

Shara Nabilah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh
220802040@student.ar-raniry.ac.id

Maura Naraseki Burkhan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh
220802055@student.ar-raniry.ac.id

Cut Yuli Tsabita Chairunnisa

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh
220802053@student.ar-raniry.ac.id

Namira Yashifa

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh
220802118@student.ar-raniry.ac.id

Syahrul Setiawan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh
220802088@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This study evaluates the performance of the Alue Naga Village government, Banda Aceh, in planning, implementing, and evaluating infrastructure development, and identifying supporting and inhibiting factors. This study also provides strategic recommendations to improve the effectiveness and efficiency of development through collaboration with the community and stakeholders. The theoretical basis uses the concept of Bernardin and Rusel's performance with indicators of productivity, service quality, responsiveness, accountability, and responsibility. The method used is descriptive qualitative with data collection through interviews with village officials and the community, direct observation, and analysis of documents such as financial reports and development plans. Data validity is guaranteed through triangulation techniques. The results of the study indicate that community involvement in planning has a positive impact on development. However, there are obstacles in the form of limited budget, weak cross-agency coordination, and lack of community awareness in maintaining facilities.

Keywords: *Government Performance; Infrastructure Development; village Alue Naga; Community Participation*

A. Pendahuluan

Indonesia menjadi suatu negara berkembang yangmana mendukung pembnaganan supaya bisa berkembang serta tak tertinggal dengan negara lain. Permasalahan pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia menjadi tantangan kompleks yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat (Haftan & Ikhsan, 2021). Selain kendala pembebasan lahan, kualitas bahan dan konstruksi, serta perencanaan yang kurang matang, masalah korupsi juga menjadi momok besar. Praktik korupsi dalam proyek infrastruktur jalan seringkali mengakibatkan penyelewengan anggaran, penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah, serta pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar. Akibatnya, infrastruktur jalan yangdibangun cepat rusak dan tidak bertahan lama, sehingga biaya perawatan menjadi membengkak (Sharfina & Alqarni, 2023).

Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar merupakan kepulauan juga menjadi faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan. Kondisi tanah yang labil, cuaca ekstrem, serta sulitnya akses ke daerah-daerah terpencil menjadi tantangan tersendiri. Pembangunan infrastruktur jalan di daerah-daerah tersebut membutuhkan teknologi dan biaya yang lebih tinggi (Arafat, 2023). Terlebih lagi, minimnya koordinasi diantara lembaga instansi pemerintahan pusat dengan daerah juga keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di daerah-daerah terpencil.

Kondisi geografis Aceh yang sebagian besar berupa daerah pegunungan dan rawa-rawamenjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pun juga bencana alam misalnya, gempa bumi, tsunami, dan longsor seringkali merusak infrastruktur yang telah ada (Iqbal. Rifin & Juanda, 2019). Konflik yang terjadi di masa lalu juga turut memperlambat pembangunan infrastruktur di beberapa daerah. Terbatasnya anggaran, sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya koordinasi diantara lembaga instansi pemerintahan pusat dengan daerah menjadi aspek penghambat lainnya (Zainal, 2022).

Di Aceh, implementasi UU Desa telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Dana Desa dimanfaatkan guna pembangunan banyak untuk infrastruktur misalnya jalan desa, jembatan, irigasi, gedung sekolah, dan

fasilitas kesehatan. Hal tersebut meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di daerah pedesaan (Daud, 2017).

Kota Banda Aceh menjadi Ibu Kota Provinsi Aceh mempunyai dinamika pembangunan berbeda. Meskipun dana desa juga dialokasikan untuk kelurahan di Banda Aceh, namun fokus pembangunan infrastruktur lebih banyak bersumber atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Infrastruktur Kota, Seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan ruang terbuka hijau (Al Kaushar, 2023).

Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan serta perekonomian Provinsi Aceh pernah menjadi korban gempa dan gelombang tsunami tahun 2004. Gempadan gelombang tsunami ini telah merusak banyak infrastruktur di Kota Banda Aceh. Infrastruktur misalnya jembatan, drainase, penahan ombak yakni tanggul, mesin pompa pengendali banjir, dan komponen lainnya sangat rusak dan hancur. Sebelum tsunami, panjang jalan kota Banda Aceh yakni 380.007 km, tetapi setelah tsunami, panjangnya menyusut menjadi 340.970 km. Populasi di Kota Banda aceh mencapai 250.303 orang dimana luas wilayah 61.36 km² serta mempunyai kepadatan penduduk tertinggi 4.470 jiwa/km² daripada kota lain di Aceh. Penduduk Kota Banda Aceh terus meningkat sebagai hasil dari migrasi serta berpindahnya penduduk menuju tempat lain (Mustika, Isya & Achmad, 2018). Disebabkan migrasi, kepelruan tempat tinggal di Kota Banda Aceh terus meningkat. Umumnya seseorang akan menginginkan tempat tinggal nyaman serta semua kemudahan tersedia.

UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa dijadikan landasan utama guna pembangunan desa di kawasan Indonesia. UU Desa pemberian keleluasaan bagi desa guna melaksanakan aturan serta mengelola pemerintahannya, termasuk dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dana Desa yang dialokasikan setiap tahunnya menjadi sumber utama pendanaan bagi desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur (Pamungkas, 2019).

Dana desa menjadi wujud komitmen pemerintah Indonesia guna mengoptimalkan pembangunan pada kawasan daerah, terutama di desa. Melalui program ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana langsung ke desa-desa dengan

tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan kemasyarakatan di skala paling bawah. Dana desa bisa dimanfaatkan untuk beragam keperluan, pembangunan infrastruktur desa misalnya jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas umum lainnya. Melalui dana desa, nantinya dapat mengurangikesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan (Zitri, Rifaid & Lestanata, 2020).

Pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia melalui pemanfaatan dana desa berdampak sangat signifikan. Infrastruktur yang memadai di tingkat desa sangat esensial guna peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Jalan desa yang baik misalnya, memberikan kemudahan akses masyarakat menuju pusat pelayanan publik, pasar, serta sekolah. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan membuka akses ke pasar yang lebih luas. Pembangunan irigasi misalnya, dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan nelayan (Anita, Fatmawati & Ma'ruf, 2024).

Alue Naga merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat target dan realisasi APBG tertinggi dalam Kecamatan Syiah Kuala pada tahun 2021 dengan persentase 96 persen. Sebagai daerah yang terbelang dekat dengan pantai, hampir sebagian masyarakat Alue Naga memilih menjadi nelayan karena didasarkan pada geografis wilayah Gampong Alue Naga yang berada di tepi pantai dalam wilayah Kota Banda Aceh. Bahkan selain menjadi nelayan, sebagian ibu-ibu disana juga turut mencari rezeki dengan melakukan pencarian tiram, kerang, udang dan kepiting dengan alat sederhana yang mana nanti hasilnya akan dijual di pasaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk angka kemiskinan, Gampong Alue Naga merupakan salah satu dari sekian banyak gampong di Kota Banda Aceh yang masih tinggi angka kemiskinannya. Pembangunan infrastruktur desa Alue Naga masih terbelang jauh dibanding dengan desa-desa yang ada di Banda Aceh (Nurtafhdilla & Hasan, 2022).

Peneliti ingin meneliti pembangunan infrastruktur di Gampong Alue Naga karena memiliki ketertarikan terhadap dinamika pembangunan dan kami melihat adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang memadai dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Selain itu, kami melihat potensi besar

yang dimiliki Alue Naga untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas, namun terkendala oleh kurangnya infrastruktur yang mendukung.

Penelitian ini penting dilakukan karena pembangunan infrastruktur di salah satu gampong termasuk Gampong Alue Naga yang memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas hidup masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Bernardin dan Rusel (2015), "*Performance is defined as the record of outcomes produce on a specified job function or activity during time period*". Kinerja yakni catatan terkait pekerjaan atau kegiatan tertentu yang dilakukan dalam waktu tertentu (Arba, 2024).

Pemerintahan merupakan system yang mengatur suatu negara atau wilayah di mana kelompok orang yang diberi mandat oleh masyarakat memiliki kekuasaan untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum. Pemerintahan dapat berbentuk monarki, republik, demokrasi, atau bentuk lainnya, tergantung pada bagaimana kekuasaan dibagi dan dikelola. Pengertian "fungsi" pemerintah juga termasuk dalam pemerintahan (Sugiman, 2018).

Kinerja pemerintah desa/gampong merupakan organisasi yang mengukur kesuksesan suatu instansi organisasi perihal meraih tujuan, visi misi pemerintah suatu desa/gampong. Kinerja pada instansi organisasi menjadi jawaban atas keberhasilan ataupun tidak tujuan instansi organisasi sebagaimana ditentukan (Kusnendra, 2018). Dalam kinerja pemerintah gampong, perlu untuk menganalisis kapasitas aparatur gampong dan sumber daya keuangan dari gampong Alue Naga guna membangun infrastruktur yang lebih baik.

Kinerja pemerintah ini dapat dianalisis berdasarkan beberapa indikator penting yang mencakup responsivitas, akuntabilitas, kualitas layanan, produktivitas, dan akuntabilitas. Masing-masing indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat menjalankan penugasan serta fungsinya secara optimal, transparan, serta disesuaikan kebutuhan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian berikut memanfaatkan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif (Abdussamad, & Sik, 2021). Metode berikut dimaksudkan guna menginterpretasikan serta mengkaji proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah gampong, juga identifikasi aspek

pendukung serta penghambat pada implementasinya. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan perangkat gampong (keuchik, sekretaris desa, kepala dusun, kepalaseksi, kepala urusan keuangan dan perencanaan), tokoh masyarakat, dan warga setempat, serta melalui observasi langsung terhadap kondisi infrastruktur yang telah dibangun. Data sekunder akan dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong), dan dokumentasi berupa foto/gambar gampong.

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif melalui kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, penyajian data serta kesimpulan (Moleong, 2022). Hasil wawancara dan dokumen yang dikumpulkan akan dibandingkan untuk memastikan validitas informasi. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan indikator kinerja misalnya produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, respontabilitas, akuntabilitas untuk menilai seberapa baik pemerintah gampong dalam menjalankan tugasnya (Medja, 2024). Sehingga penelitian berikut nantinya bisa membagikan visualisasi komprehensif tentang kualitas kinerja pemerintah Gampong Alue Naga di Kota Banda Aceh dan rekomendasi perbaikan dalam pembangunan infrastruktur ke depan.

C. Hasil Penelitian

Gampong Alue Naga yakni suatu gampong di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ada di kawasan pesisir serta berbatasan langsung Selat Malaka. Gampong Alue Naga dipisahkan Sungai Lamnyong pada tenga gampong, Gampong Alue Naga terdiri dari 4 dusun yakni Dusun : Musafir ,Kutaran, Po Diamat , dan Beunot. Gampong Alue Naga mempunyai luas wilayah 1.884.815 m². Dengan batas utara Samudera Hindia, batas timur Kabupaten Aceh Besar, batas selatan Desa Tibang, dan batas barat Desa Deah Raya. Gampong ini juga memiliki jumlah bidang tahan 1.207 bidang dengan jumlah bidang bersertifikat sebanyak 1.060 bidang.

Gampong Alue Naga ini terdiri dari 4 dusun, jumlah penduduk Dusun Musafir sebanyak 636 orang, jumlah penduduk Dusun Kutaram sebanyak 629 orang, jumlah penduduk di Dusun Beunot sebanyak 231 orang, dan jumlah penduduk Dusun Po Diamat sebanyak 329 orang.

1. Produktivitas

Anggaran gampong tidak dapat membangun beberapa infrastruktur sekaligus, dikarenakan dana tersebut sudah memiliki rencana pembangunan masing-masing, akan tetapi pembangunan di gampong Alue Naga akan terus mengalami keberlanjutan agar masyarakat bisa menggunakan infrastruktur tersebut secara efektif. Gampong Alue Naga sendiri memiliki 4 dusun dimana setiap dusun memiliki ajuan rencana pembangunan infrastruktur masing-masing, maka dari itu pembangunan yang akan dilakukan dibedakan setiap tahunnya.

Pembangunan infrastruktur di Gampong Alue Naga dilaksanakan ketika ada keluhan dari masyarakat setempat. Pembangunan yang sudah ada namun belum sempurna, maka di tahun berikutnya akan di lanjutkan dan memang karena adanya kebutuhan masyarakat sehingga keluhan terkait pembangunan yang belum terealisasi terus diajukan ke pihak kecamatan. Masyarakat akan terus dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan dimulai dari RAPBG sampai ke pelaksanaan. Perangkat gampong juga akan menampung keluhan atau masukan dari masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur berjalan secara efektif.

Sejauh ini pembangunan sudah berjalan efektif dan berguna bagi masyarakat, namun perlu adanya perbaikan pada pembangunan infrastruktur digampong tersebut sehingga menciptakan pembangunan yang sempurna dan sangat menguntungkan bagi seluruh masyarakat Gampong Alue Naga. Aparatur gampong akan terus menampung keluhan/masukan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur berjalan secara efektif. Sebelum masuk tahun 2025, gampong alue naga telah membuat RKPG yang menampung aspirasi masyarakat dari 4 dusun digampong tersebut (Kutaran, Musafir, Po Diamat, Beunot).

Pada saat disusun RAPBG, pihak gampong akan memberi susunan/list ajuan pembangunan ke kecamatan, pihak kecamatan akan mengonfirmasi bisa atau tidaknya dilakukan. Jika tidak bisa, pihak gampong akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembangunan ini tidak bisa dilakukan karena dana yang tidak cukup atau tidak menjadi prioritas, konfirmasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak berfikir bahwa aspirasi mereka hanya ditampung dan tidak diajukan ke kecamatan.

Masyarakat terus dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di Gampong Alue Naga. Sebelum adanya APBG. Masyarakat membantu merancang RAPBG, pada saat melakukan musyawarah gampong terdapat tuha peut, masyarakat, dan beberapa perangkat gampong lainnya. Keterlibatan masyarakat sesuai dengan pembangunan terjadi didusun masing-masing dan harus diutamakan masyarakat dari dusun tersebut (swadaya).

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, produktivitas dinilai sebagai ukuran efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya untuk menyelesaikan proyek infrastruktur dengan bentuk pertanggungjawaban realisasi pekerjaan yakni wujud dari program kerja yang telah dibuat. Oleh karena itu, produktivitas sangat penting dalam memastikan bahwa proyek infrastruktur diselesaikan tepat waktu, sesuai akan standarisasi penetapan serta mendapatkan dukungan aktif dari semua stakeholders.

2. Kualitas Layanan

Masyarakat Gampong Alue Naga merasakan peningkatan kualitas layanan melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga. Berbagai fasilitas, seperti Posyandu, dapur meunasah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan tempat pemangkalan perahu, memberikan manfaat signifikan bagi kehidupan sehari-hari. Posyandu, misalnya, memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap bulan, sehingga membantu menjaga kesehatan keluarga sekaligus mencegah penyakit lebih awal. Selain itu, Posyandu juga mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya kesehatan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan.

Dapur meunasah dijadikan bagian esensial guna kehidupan sosial serta budaya kemasyarakatan. Tidak hanya digunakan sebagai tempat memasak bersama, fasilitas ini juga difungsikan sebagai ruang kegiatan komunitas, termasuk untuk acara kenduri, pertemuan adat, dan gotong royong. Kegiatan ini memperkuat hubungan sosial, membangun solidaritas antarmasyarakat, serta melestarikan tradisi lokal yang sudah diwariskan turun-temurun. Melalui keberadaan dapur meunasah, masyarakat memiliki sarana yang mendukung interaksi sosial sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitasnya.

Fasilitas PAUD yang dibangun di gampong ini turut memberikan dampak positif dalam menunjang pendidikan anak-anak usia dini. Anak-anak mendapatkan pendidikan dasar tak hanya berorientasi akan aspek akademik, namun mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan motorik. PAUD ini mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi jenjang pendidikan formal dengan bekal yang lebih matang. Selain itu, pendidikan usia dini menjadi langkah strategis untuk membangun generasi yang lebih cerdas, mandiri, dan mampu bersaing di masa depan.

Pembangunan fasilitas pemangkalan perahu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya bagi para nelayan. Sebelumnya, pendangkalan muara sering menjadi kendala utama yang menyulitkan akses menuju laut. Dengan adanya fasilitas ini, nelayan dapat melaut dengan lebih mudah dan efisien, sehingga produktivitas mereka meningkat. Selain itu, fasilitas ini memberikan dampak positif pada pendapatan keluarga nelayan, sekaligus memperkuat sektor ekonomi lokal yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat di gampong.

Gampong Alue Naga dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Beberapa fasilitas, seperti dapur meunasah, PAUD, dan pemangkalan perahu, menjadi prioritas utama karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meski demikian, masih terdapat kebutuhan lain yang perlu diperhatikan di masa mendatang, seperti peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan lanjutan, agar pembangunan di gampong ini semakin merata dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur ini tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya. Partisipasi warga, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, menjadi kunci utama agar fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap infrastruktur tersebut, sehingga pemanfaatan dan pemeliharannya dapat dilakukan secara maksimal.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur di Gampong Alue Naga tidak hanya memberikan manfaat secara fisik, tetapi juga mendukung peningkatan kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Fasilitas yang ada

dirancang untuk memberikan solusi jangka panjang, sekaligus menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan mampu bersaing di masa mendatang. Kualitas layanan yang sudah di rasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur ini seperti dapur meunasah, dimana masyarakat bisa memasak bersama di dapur meunasah dan masyarakat bisa melakukan kegiatan sosial dan budaya untuk memperkuat ikatan komunitas, dan ada juga PAUD dengan adanya PAUD jadi anak-anak masyarakat tersebut bisa menggapai pendidikan dasar bagi anak-anak masyarakat dan mempersiapkan Pendidikan selanjutnya untuk meningkatkan kecerdasan dengan keterampilan sosial mereka, dan yang terakhir adanya pemangkalan perahu yaitu memudahkan nelayan untuk melaut terutama dalam menghadapi masalah pendangkalan muara yang menyulitkan akses ke laut.

3. Responsivitas

Pembangunan di Gampong Alue Naga telah memberikan hasil yang signifikan meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam proses implementasinya. Hambatan utama tertundanya pencairan dana desa yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mana merebak seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut berdampak besar akan banyak sektor, termasuk pembangunan desa yang sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, beberapa infrastruktur penting berhasil direalisasikan, seperti gedung serbaguna, posyandu, masjid, PAUD, tambak tiram, dan dermaga nelayan.

Selain itu, pemerintah gampong juga membangun tempat docking boat yang memfasilitasi para nelayan dalam melakukan aktivitas peristirahatan kapal. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan adalah pendirian rumah produksi kerupuk tiram, yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap hasil laut. Upaya ini menjadi sangat relevan karena sebagian besar masyarakat Gampong Alue Naga, sekitar 80%, berprofesi sebagai petani tiram. Di masa mendatang, pembangunan fasilitas baru, seperti lapangan olahraga dan area multifungsi, menjadi prioritas utama yang direncanakan guna mendukung kegiatan masyarakat secara lebih optimal.

Hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Alue Naga juga disebabkan oleh tantangan eksternal yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan

utama adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, tak hanya berdampak akan kesehatan masyarakat namun stabilitas perekonomian lokal. Penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu akibat dari situasi ini, terutama dalam hal pembelian hasil tangkapan ikan. Sementara itu, kebutuhan dasar nelayan terus meningkat sehingga sering kali sulit dipenuhi. Di sisi lain, infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, seperti jembatan penghubung antar dusun yang hancur setelah tsunami, menjadi kendala besar dalam memastikan aksesibilitas masyarakat.

Meskipun, pihak pemerintah gampong telah berulang kali mengajukan perbaikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, belum ada tanggapan konkret yang diterima. Untuk memastikan kelancaran mobilitas warga, pemerintah gampong mengambil inisiatif dengan mengalihkan jalur penghubung antar dusun sejauh satu kilometer dari bibir pantai sebagai solusi sementara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah di tengah keterbatasan yang ada.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan di Gampong Alue Naga memiliki peran yang sangat krusial. Seluruh proses perencanaan program selalu diawali dengan musyawarah bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah gampong. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan dana desa, sekaligus pemberian peluang bagi kemasyarakatan guna menyampaikan pendapat, saran, serta solusi atas permasalahan dihadapi. Semangat gotong royong yang kuat menjadi modal sosial utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di Gampong Alue Naga. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, pelaksanaan program pembangunan tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Selain itu, sinergi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat untuk menghadapi banyaknya kemunculan tantangan di kemudian hari. Pemerintah gampong juga memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi upaya guna peningkatan kesejahteraan penduduk. Berbagai program telah dilaksanakan, seperti distribusi alat tangkap untuk para nelayan, pelatihan keterampilan, serta penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada kalangan masyarakat terdampak pandemi.

Pemerintah gampong juga kerap mengajukan perbaikan jembatan penghubung antar dusun yang runtuh pasca-tsunami, namun tidak menemukan titik terang dan jawaban dari pihak Pemerintah Kota (Pemko). Sehingga untuk masalah akses masyarakat agar lebih mudah antar dusun berinteraksi maka digesernya 1 kilometer dari bibir laut.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di gampong ini sangat penting dikarenakan seluruh anggota melakukan musyawarah dan mufakat sebelum penyaluran dana yang tepat, dalam perencanaan nya masyarakat memberikan suara dan pendapat nya untuk solusi dan penyelesaian yang signifikan. Kinerja pemerintah Gampong Alue Naga yang berfokus pada pembangunan infrastruktur memiliki indikasi yang erat dengan konsep responsivitas yang didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah gampong untuk mengenali kebutuhan masyarakat, merespons aspirasi, dan mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Pihak gampong selalu berusaha untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas dengan memanfaatkan pembangunan yang sudah ada. Pembangunan yang sempurna juga berdampak baik dan sangat menguntungkan bagi seluruh masyarakat Gampong Alue Naga.

4. Akuntabilitas

Penerapan akuntabilitas di Gampong Alue Naga dapat dilihat dari pengelolaan anggaran pembangunan yang telah dilakukan dengan baik selama 3 tahun terakhir dengan memastikan dana yang di alokasikan digunakan secara tepat sasaran. Meskipun demikian masih terdapat kebutuhan untuk pengembangan dan perbaikan dalam proses pembangunan infrastruktur agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pada tahun 2021, desa ini memulai langkah signifikan dalam pembangunan infrastruktur dengan membangun posyandu sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Sebelumnya, fasilitas kesehatan untuk ibu dan anak sangat terbatas, sehingga kehadiran posyandu menjadi sebuah terobosan penting. Pada tahun 2024, pembangunan posyandu dilanjutkan untuk memperluas ruang dan fasilitas yang ada, mewujudkan lingkungan nyaman serta aman bagi pengunjung. Dengan adanya posyandu, masyarakat kini memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil dan anak balita.

Sistem pemerintahan desa yang diterapkan bersifat bottom-up, di mana setiap rencana pembangunan dimulai dari suara masyarakat. Proses ini dimulai dengan musyawarah di tingkat dusun yang kemudian diangkat ke tingkat desa. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Rencana Kerja Tahunan (RKPG) yang dihasilkan dari musyawarah ini menjadi dasar bagi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG), memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Selain posyandu, beberapa fasilitas penting lainnya juga dibangun untuk mendukung kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah docking boot, tempat pemberhentian bagi para nelayan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas mereka. Selain itu, pembangunan gedung serbaguna memberikan ruang multifungsi bagi masyarakat untuk mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari pertemuan hingga acara sosial. Kehadiran PAUD juga menjadi langkah positif dalam mendukung pendidikan anak usia dini di desa ini.

Masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pembangunan infrastruktur ini. Mereka merasa bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka didengar dan diperhatikan oleh pemerintah desa. Contohnya, dengan adanya posyandu, kini tersedia tempat penyimpanan mainan untuk anak-anak, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan tetapi juga memberikan rasa memiliki kepada masyarakat atas fasilitas yang dibangun.

Pada haketanya, pembangunan infrastruktur di desa ini berjalan efektif dan terjadi banyak perkembangan positif. Dengan adanya berbagai fasilitas baru, kegiatan masyarakat menjadi lebih mudah dilakukan dan akses terhadap layanan dasar semakin baik. Masyarakat kini merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan terus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, diharapkan pembangunan desa akan semakin berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan nyata warga.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah gampong menjadi kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui musyawarah gampong warga, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga program yang

dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur memiliki hubungan yang signifikan dengan indikator akuntabilitas terutama dalam konteks pengelolaan dana desa serta partisipasi masyarakat. Akuntabilitas pada pengelolaan dana desa tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas dan kualitas pembangunan infrastruktur.

5. Responsabilitas

Di Gampong Alue naga penerapan responsabilitas sebagian besar sudah terlaksanakan meskipun terdapat beberapa permintaan dari masyarakat belum terealisasi secara sempurna dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi, pembangunan di gampong ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang di berikan oleh pemerintah.

Pelaksanaan tanggung jawab di Gampong Alue Naga sebagian besar telah berjalan optimal mesti terdapat beberapa kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi akibat keterbatasan dana. Proses pembangunan di gampong ini dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan prioritas dalam pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Berbagai fasilitas yang telah dibangun sesuai kebutuhan masyarakat, seperti dapur umum, memberikan manfaat meskipun penyediaannya belum sempurna. Salah satu warga menyampaikan bahwa fasilitas tersebut telah memenuhi kebutuhan masyarakat meski sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hal ini membuktikan bahwa kendala anggaran tidak sepenuhnya menghalangi manfaat yang dapat diperoleh dari fasilitas yang telah dibangun.

Dari sekian banyak usulan yang diajukan oleh pihak gampong kepada kecamatan, hanya sebagian yang dapat direalisasikan. Kecamatan cenderung memprioritaskan usulan yang dinilai paling mendesak atau penting. Salah satu kebijakan gampong yang belum terlaksana adalah pembangunan saluran air. Sebelumnya, masyarakat dan perangkat gampong sudah berupaya membangun saluran air untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. Akan tetapi, keterbatasan anggaran serta persoalan tanah menjadi penghambat penyelesaian pembangunan saluran induk tersebut. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat dalam merawat

fasilitas yang ada mengakibatkan saluran air tertimbun dan tidak dapat berfungsi dengan baik.

Perangkat gampong menjelaskan bahwa setiap tahun pihaknya mengusulkan pembangunan saluran air, tetapi belum ada hasil karena proyek ini membutuhkan dana besar yang hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat. Jika hanya mengandalkan dana gampong, anggaran tersebut belum cukup dan kurang efektif. Meskipun saluran induk sudah ada, persoalan tanah dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kendala utama. Saluran yang pernah dibangun sebelumnya akhirnya tidak berfungsi karena kurangnya perhatian terhadap kelestarian lingkungan.

Kondisi ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, perangkat gampong, dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah sangat penting, terutama untuk proyek besar seperti saluran air. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga fasilitas umum perlu diperkuat agar infrastruktur yang telah dibangun dapat bertahan lebih lama.

Di luar persoalan infrastruktur, pemerintah gampong juga perlu merancang program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan. Contohnya, pelatihan atau penyuluhan yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat menjadi langkah efektif dalam membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap fasilitas yang ada. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengandalkan dana, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam menjaganya.

Agar pembangunan di Gampong Alue Naga berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sinergi berbagai pihak sangat diperlukan. Pemerintah gampong harus terus berkoordinasi dengan kecamatan dan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan fasilitas. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan pembangunan di Gampong Alue Naga dapat berjalan lebih merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, akuntabilitas dan respontabilitas dalam pengelolaan anggaran gampong berkontribusi besar terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur guna meraih pembangunan optimal serta berkelanjutan. Meskipun ada usaha pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan melalui musyawarah dan mufakat, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, penundaan alokasi dana akibat pandemi, dan masalah kesadaran masyarakat dalam merawat fasilitas

Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai pentingnya peningkatan responsivitas, akuntabilitas, respontabilitas, produktivitas dan kualitas layanan dalam pengelolaan infrastruktur gampong. Hasil dan pembahasan tersebut tidak hanya membutuhkan pengakuan atas kebutuhan masyarakat tetapi juga tindakan nyata dan efisien dan efektif dalam menjawab berbagai kebutuhan. Kualitas layanan pembangunan di Gampong Alue Naga menunjukkan hasil yang positif, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Pengelolaan dana desa dilaksanakan transparan serta partisipatif, meningkatkan akuntabilitas dan relevansi proyek dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini memerlukan keberlanjutan pembangunan (sustainable development) yang baik, karena jika pembangunan tidak sempurna maka akan berdampak buruk bagi masyarakat dan pembangunan yang sudah ada hanya akan menyia-nyiakan anggaran gampong. Baiknya masyarakat juga berperan dalam menjaga pelestarian pembangunan agar tidak rusak dan pembangunan berlaku jangka panjang. Selanjutnya, alangkah baiknya pemerintah dapat segeramerespon usulan dari masyarakat Gampong agar pembangunan dapat terealisasi dengan baik dan dapat memperbaiki kekurangan yang ada sehingga kebutuhan masyarakat di Gampong Alue Naga tidak jauh tertinggal dengan gampong lain dengan memprioritaskan pembangunanyang paling di butuhkan.

Dengan melihat penelitian terdahulu, akuntabilitas pemerintah gampong menjadi kunci dalam memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya. Inipenting bagi pemerintah untuk menerapkan praktik yang membuat masyarakat merasa dilibatkan dan mengetahui penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Responsivitas bukan hanya mendengar

aspirasi tetapi juga mengambil tindakan sesuai kebutuhan masyarakat. Di Gampong Alue Naga, mekanisme musyawarah desa telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya.

Produktivitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga mencerminkan seberapa baik sumber daya digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan lambatnya tindak lanjut dari pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi. Responsibilitas pemerintah gampong dalam pembangunan infrastruktur saat ini juga menunjukkan sejauh mana mereka dapat memenuhi tugas dan fungsinya. Hal ini sangat relevan bagi Gampong Alue Naga, di mana perencanaan yang baik akan membantu memastikan bahwa proyek infrastruktur dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah gampong juga sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan infrastruktur. Seperti peningkatan kualitas layanan melalui pembangunan fasilitas seperti Posyandu, dooking boot, mushola, budidaya tiram gedung serbaguna dan PAUD dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi harus diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan lain seperti air bersih.

Korelasi ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah gampong perihal pembangunan infrastruktur di Gampong Alue Naga harus mempertimbangkan berbagai indikator seperti akuntabilitas, responsivitas, responsibilitas, produktivitas, dan kualitas layanan. Mengaitkan temuan dari penelitian sebelumnya memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan serta ketersediaan peluang, guna meraih hasil optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah gampong dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur di Gampong Alue Naga telah mencerminkan upaya pemerintah gampong untuk merespons kebutuhan masyarakat, terutama melalui mekanisme musyawarah dan partisipasi masyarakat. Beberapa infrastruktur, seperti gedung serbaguna, dooking boot, mushola, dan PAUD, berhasil direalisasikan meski dengan keterbatasan anggaran. Hal ini mencerminkan

adanya tingkat responsivitas dan produktivitas yang cukup baik meskipun belum optimal. Namun, terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan kapasitas pemerintah gampong dalam memenuhi aspirasi tersebut. Tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi dengan pemerintah tingkat atas, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang ada menjadi hambatan signifikan.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur di Gampong Alue Naga menunjukkan kemajuan, namun untuk mencapai hasil yang lebih tinggi, diperlukan langkah strategis seperti pengelolaan prioritas yang lebih baik, penguatan kapasitas aparatur gampong, dan kolaborasi dengan pihak ketiga. Dengan demikian, pembangunan di Gampong Alue Naga tak hanya mampu pemenuhan kebutuhan kini, namun bisa mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Afrizal, D., Anisa, D., Khaliq, M., & Yusrizal, D. (2021). Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 60-67.
- Al Kaushar, M. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Anita, J. S., Fatmawati, F., & Ma'ruf, A. (2024). IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(1), 27-38.
- Arafat, A. Y. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Arba, I. (2024). *Kinerja Pemerintahan Gampong Terhadap Infrastruktur Perbaikan Jalan Gampong Blang Teungoh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan).

- Daud, M. (2017). Implementasi anggaran desa dalam meningkatkan pembangunan desa (suatu penelitian di gampong Lamdingin kota Banda Aceh). *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 1(1), 21-29.
- Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Ugm Press.
- Haftan, A. H., & Ikhsan, I. (2021). Pengaruh Infrastruktur dan Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 3(1).
- Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Tata Loka*, 21(1), 75-84.
- Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 1-8.
- MEDJA, A. A., ROMPAS, W., & KOLON DAM, H. (2020). Penerapan Responsibilitas Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(97).
- Moleong, L. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung PT Remaja Rosdakarya Offset 2018 Google Scholar. Accessed: Nov, 28.
- Mustika, F., Isya, M., & Achmad, A. (2018). Analisis pengaruh kepadatan permukiman terhadap pelayanan infrastruktur di kota banda aceh. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 1(4), 138-147.
- Nurtafdhillah, R. A., & Hasan, E. (2022). Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Peningkatan Ekonomi Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(4).
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- Ratnasari, S. L., Haryani, D. S., & Tanjung, R. (2020). Workplace bullying causing negative employee behaviours: A case from the Indonesian banking sector. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(11), 441-458.
- Ratnasari, S. L., Lestari, L., & Kepulauan, U. R. (2020). Effect of Leadership Style, Workload, Job Insecurity on Turnover Intention. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(2), 2201-1315.

- Sharfina, H., & Alqarni, W. (2023). Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Terhadap Aspek Infrastruktur Jalan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(2).
- Starling, G. (1993). *Managing the public sector* (p. 259). Wadsworth Pub..
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Yolanda, E. (2023). DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT KABUPATEN KERINCI: Elsa
- Yolanda, Syafri Juana, Ardianto Arsan. *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA*, 5(3), 216-227.
- Zainal, S. (2022). Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(1), 87-104.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2), 164-190.